



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE- 2 JUNI 2025



HARMONISASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH



POS BANTUAN HUKUM



PEMBENTUKAN REGULASI
DAN PEMBINAAN HUKUM

**KANWIL KEMENKUM
KALIMANTAN SELATAN**

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[@kemenkumkalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](#)



Kemenkum Kalsel dan Pemkab HSS Gelar Koordinasi Awal Pemeriksaan Indikasi Geografis Kayu Manis Loksado



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan rapat koordinasi awal secara daring bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam rangka persiapan pemeriksaan substantif indikasi geografis (IG) Kayu Manis Loksado, Selasa (10/06/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, ini menjadi langkah awal dalam mematangkan persiapan sebelum kedatangan tim penilai substantif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI. Turut hadir jajaran bidang Pelayanan KI dan perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten HSS.

Indikasi geografis Kayu Manis Loksado diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kayu Manis Loksado dengan nomor permohonan E-IG.12.2021.000017 tertanggal 24 November 2021, dan telah diumumkan secara resmi sejak 19 Februari hingga 19 April 2025.

Pemeriksaan substantif atas permohonan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 hingga 19 Juni 2025 di Kecamatan Loksado. Dalam koordinasi ini, Dinas Pertanian Kabupaten HSS menyatakan kesiapannya untuk bersinergi mendukung proses penilaian tersebut, termasuk menyiapkan seluruh dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan oleh tim penilai.

Riswandi menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan akan terus mengawal dan mendampingi proses pemeriksaan substantif ini, serta memastikan seluruh tahapan berjalan lancar hingga penetapan Kayu Manis Loksado sebagai produk indikasi geografis resmi.



Menjaga Keselarasan Regulasi, Kemenkum Kalsel Harmonisasikan 2 Rancangan Produk Hukum Kabupaten Banjar



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menggelar rapat harmonisasi rancangan produk hukum daerah, kali ini bersama Pemerintah Kabupaten Banjar yang mengajukan dua rancangan regulasi untuk dikaji dan diselaraskan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana. Dalam arahannya, Anton menekankan bahwa harmonisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Ia menjelaskan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk memastikan keselarasan antara rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi pertentangan norma hukum dan tumpang tindih kewenangan.

Rapat harmonisasi yang berlangsung di ruang pertemuan Kanwil Kemenkum Kalsel tersebut dipimpin oleh Bahjahtul Mardiah selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dengan didampingi oleh jajaran Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan serta para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Banjar, hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Nashrullah Shadiq, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Ahmad Rizal Putra, serta perwakilan dari sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Pertanian; serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Dua rancangan yang menjadi pokok bahasan dalam rapat harmonisasi ini yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Banjar tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Simpang Empat–Mataraman.

Dalam sambutannya, Nashrullah Shadiq menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel melalui proses harmonisasi. Ia menegaskan bahwa kedua rancangan tersebut sangat penting untuk memastikan arah pembangunan dan penataan ruang di Kabupaten Banjar ke depan. Dikatakannya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, RPJMD wajib ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Sedangkan penyusunan Ranperbup RDTR mengacu pada Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021–2041.

Sepanjang proses harmonisasi, Bahjahtul Mardiah menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap kedua naskah rancangan. Ia memberikan masukan substansi maupun redaksional demi menjamin bahwa peraturan yang akan dihasilkan tidak hanya selaras secara hukum, tetapi juga dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Bahjahtul menegaskan pentingnya menjaga kejelasan norma, menghindari tumpang tindih aturan, serta memastikan keseragaman istilah dan struktur kalimat. Menurutnya, pembentukan peraturan yang baik tidak hanya soal legalitas, tetapi juga soal keterbacaan dan efektivitas implementasi.

Suasana rapat berlangsung interaktif. Peserta dari kedua belah pihak aktif menyampaikan masukan, pendapat, dan klarifikasi atas setiap bagian penting dari rancangan. Diskusi yang terbuka menunjukkan adanya semangat kolaboratif dalam menciptakan regulasi yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keseluruhan rangkaian harmonisasi berjalan secara tertib dan konstruktif. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar dalam penyempurnaan naskah akhir rancangan peraturan, sebelum nantinya dilanjutkan ke tahapan legislasi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultasi Hukum Makin Mudah, Kemenkum Hadirkan 5.008 Pos Bantuan Hukum



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menghadirkan 5.008 pos bantuan hukum (Posbankum) yang tersebar di desa/kelurahan seluruh Indonesia. Kehadiran Posbankum ini akan memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan konsultasi hukum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk masyarakat tidak mampu, memiliki akses yang sama terhadap pendampingan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan Kemenkum adalah pembentukan Posbankum.

“Posbankum merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi dan konsultasi, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, dan rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum ataupun pro bono. Posbankum di desa dan kelurahan menjadi solusi strategis menuju akses keadilan,” kata Supratman dalam acara peluncuran Posbankum di gedung Kemenkum, Kamis (5/6/2025).

Menteri Supratman menyebutkan pembentukan Posbankum telah dimulai sejak awal tahun 2025 dengan target sebanyak 7.000 Posbankum. Layanan ini didukung oleh paralegal yang berasal dari Kelompok Keluarga/Komunitas Sadar Hukum (Kelompok Kadarkum) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan paralegal oleh Kemenkum.

Selain itu, Posbankum juga didukung oleh Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai yang telah mengikuti dan lulus peacemaker training yang diselenggarakan oleh Kemenkum pula. Sehingga, permasalahan hukum di tingkat desa bisa diselesaikan pada tingkat desa atau kelurahan.

“Paralegal, kepala desa, dan lurah yang mendukung Posbankum telah lulus pelatihan sehingga memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Ini merupakan upaya kami untuk mewujudkan pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat sehingga semua warga masyarakat dapat memperoleh akses keadilan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebetulnya Kemenkum telah memiliki program bantuan hukum gratis melalui organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) terakreditasi. Dalam periode 2025-2027, sebanyak 777 PBH telah lulus akreditasi. Namun, jumlah ini masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pendampingan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tergolong miskin.

Untuk itu, Kemenkum mengambil pendekatan yang berpusat pada masyarakat (People-centered Justice) dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk Posbankum. Lingkup pelibatan masyarakat ini mencakup adanya alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, serta inisiatif masyarakat lainnya dalam upaya pemberdayaan hukum.

“Keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya berperan sebagai titik layanan informasi dan konsultasi hukum, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan dan bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat desa/kelurahan dapat memahami hak dan kewajibannya, memiliki tempat menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi perdamaian, dan juga rujukan advokat jikalau dibutuhkan tindak lanjut untuk layanan bantuan hukum litigasi,” jelasnya.

Untuk menemukan Posbankum terdekat, masyarakat dapat mencari melalui situs pencarian Google dengan mengetik “Posbankum Desa/Kelurahan (Nama Lokasi)”. Masyarakat juga dapat mencari melalui aplikasi Google Maps dengan menuliskan “Posbankum diikuti nama Desa/Kelurahan”. Di samping itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi di kantor desa dan kantor lurah setempat.

Konsultasi Hukum Makin Mudah, Kemenkum Hadirkan 5.008 Pos Bantuan Hukum



Menteri Supratman juga mengajak para paralegal, juru damai, serta Posbankum untuk mengedukasi masyarakat tentang pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah 70ribu-an koperasi desa/kelurahan yang melakukan pemesanan nama. Sekitar 6ribu dari jumlah tersebut telah mendapatkan pengesahan badan hukum, dari target 80.000 Koperasi Merah Putih.

“Saya mengingatkan program Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Koperasi Merah Putih. Saya berharap teman-teman yang mengikuti pelatihan paralegal maupun juru damai ini bisa menjadi atensi. Saya mohon kepada teman-teman kantor wilayah Kemenkum untuk bisa melakukan pendampingan, permudah untuk melakukan proses itu dan bantu bekerja sama dengan Ikatan Notaris di daerah untuk bisa mempercepat proses tersebut,” pinta Supratman.

Dalam acara peluncuran Posbankum ini, Kemenkum juga meluncurkan Portal Informasi Bantuan Hukum yang berisi Aplikasi Ruang Paralegal (Apregal), Aplikasi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Aplikasi Sidbankum, Aplikasi Literasi Hukum, dan Aplikasi Penyuluhan Hukum.

Di momen yang sama, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian Hukum dengan Mahkamah Agung tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peacemaker Justice Award 2025; Kemenkum dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum; Kemenkum dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desa; serta Kemenkum dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembinaan Hukum Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik dan mendukung penuh atas peluncuran 5.008 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) oleh Kementerian Hukum sebagai terobosan strategis dalam memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, kehadiran Posbankum tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap layanan hukum, tetapi juga memperkuat ekosistem hukum berbasis masyarakat. “Langkah ini sangat relevan dengan pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat. Di Kalimantan Selatan, kami siap mendukung pelaksanaan program ini dengan memperkuat sinergi antara paralegal, aparat desa, dan seluruh unsur pembina hukum di daerah,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengakselerasi upaya edukasi hukum serta memperkuat kolaborasi dengan notaris, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah guna memastikan Posbankum berjalan optimal dan menjangkau kelompok rentan secara efektif.



4 Pesepakbola Belanda Resmi menjadi Pertiwi untuk Timnas Putri Garuda



Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada empat atlet sepak bola wanita melalui mekanisme naturalisasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, yang didampingi oleh Plh. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU (Ditjen AHU), Hantor Situmorang, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

Empat atlet tersebut adalah pertama Emily Julia Frederica Nahon memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang neneknya lahir di Bogor, Jawa Barat, bek ptengah yang berkarir pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19 ADO Den Haag (Level 1 Belanda) dan kerap kali bermain di Tim Senior. Atlet kedua naturalisasi selanjutnya Felicia Victoria de Zeeuw, memiliki garis keturunan Indonesia yakni nenek dari ibunya lahir di Jakarta, gelandang serang handal yang sebelumnya berkarir pada musim 2021/2022 dipromosikan ke Tim U-16, dan pada musim 2022/2023 pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19, dan pada musim 2024/2025 bermain dengan Tim Senior ADO Den Haag (Level 1 Belanda) kembali lagi dipromosikan ke Tim U-17.

Ketiga, Iris Joska de Rouw yang akan diandalkan sebagai kiper Timnas sepakbola wanita yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, sebelumnya menghabiskan 3 musim di tim Youth Sparta Rotterdam (2019 - 2022) dan saat ini dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam. Terakhir yakni Isa Guusje Warps memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Padang, Sumatera Barat, sebagai penyerang andalan sayap kanan yang sebelumnya berkarir di Klub asal Belgia yaitu KRC Genk Ladies (Level 1 Belgia) dan bergabung dengan Tim Senior sampai akhir musim 2023/2024, dan saat musim 2024/2025 ia kembali berlabuh ke Tim asal Belanda yaitu NAC Breda (Level 1 Belanda).

Widodo dalam sambutannya menegaskan, bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata. "Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia," ujar Widodo.

Naturalisasi Atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Ditjen AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait. Serta partisipasi semua pihak, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Intelijen Negara dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).



Bertambahnya 4 pesepakbola wanita dalam skuad Tim Nasional Indonesia Putri bukan merupakan hal yang baru dikarenakan sebelumnya di tahun 2024, Pemerintah juga sudah melakukan naturalisasi terhadap 2 pesepakbola wanita yaitu Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu yang diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Beberapa agenda yang menjadi agenda jangka panjang untuk Timnas Putri adalah dapat mencapai target ranking 50 besar FIFA (10 besar Asia), lolos di setiap putaran final AFC Women Asian Cup dan lolos ke FIFA Women World Cup 2035. Hal ini merupakan cita-cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

Widodo dalam sambutannya menegaskan, bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata. "Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia," ujar Widodo.

Naturalisasi Atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Ditjen AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait. Serta partisipasi semua pihak, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Intelijen Negara dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Widodo menambahkan, bahwa kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih.

Widodo juga menegaskan, komitmennya untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional.

"Menteri Hukum sudah memberi arahan untuk mendukung dan mempercepat semua proses naturalisasi yang memiliki kepentingan prestasi nasional dan kebanggaan bangsa, tentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan" ujarnya

Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan proses naturalisasi empat pesepakbola wanita keturunan Indonesia yang kini resmi menjadi bagian dari Tim Nasional Putri. Ia menilai bahwa kebijakan pewarganegaraan ini bukan hanya langkah administratif, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendorong prestasi olahraga nasional melalui pendekatan yang visioner dan inklusif.

"Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada generasi muda, termasuk diaspora, agar bisa berkontribusi bagi kejayaan Merah Putih. Kementerian Hukum, khususnya di wilayah, siap mendukung seluruh tahapan administrasi kewarganegaraan sesuai regulasi yang berlaku, terutama jika hal itu membawa manfaat besar bagi bangsa dan negara," ujar Nuryanti.

Ia menambahkan bahwa sinergi antarinstansi dalam proses naturalisasi ini menunjukkan kerja kolaboratif yang baik dalam mendorong Indonesia menjadi kekuatan baru dalam peta olahraga dunia.





Perkuat Integritas Anggaran, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Monitoring Data Kepemilikan Sertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik Pejabat Perbendaharaan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembukaan Monitoring Data Kepemilikan Sertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pejabat Perbendaharaan serta Implementasi Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) di lingkungan Kementerian Hukum, pada Rabu (11/06).

Kegiatan yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kanwil Kemenkum Kalsel, Yansurullah, beserta anggota tim kerja dari Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kepemilikan sertifikasi oleh para pejabat perbendaharaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara, serta mendorong penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SAKTI.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.05/2019, seluruh PPK dan PPSPM diwajibkan memiliki sertifikasi Pejabat Negara Tersertifikasi (PNT/SNT) paling lambat hingga Desember 2025. Selain itu, berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2024, seluruh Bendahara juga diwajibkan untuk memiliki sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) paling lambat hingga Juni 2025.

Dalam arahannya, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sri Yusfina Yusuf menyampaikan komitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan melalui dukungan penuh terhadap sertifikasi pejabat perbendaharaan dan pelaksanaan PKIPA di seluruh satuan kerja.

"Biro Keuangan memiliki mandat untuk mendukung penuh dan melakukan koordinasi dalam implementasi Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA). Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum diharapkan segera menyesuaikan, khususnya dalam kepemilikan sertifikasi PPK, PPSPM, dan Bendahara, serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam aplikasi SAKTI," tegasnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Monitoring Data Kepemilikan Sertifikasi dan TTE serta tindak lanjut implementasi PKIPA, yang bertujuan memastikan kesesuaian data dan progres pelaksanaan kebijakan perbendaharaan secara nasional dengan Kanwil Kemenkum Kalsel terjadwal pada hari Kamis, 12 Juni 2025.

Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda RPJMD dan Ranperbup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Balangan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Balangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Balangan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rapat ini digelar bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan di Aula Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti. Dalam sambutannya, Anton menyampaikan pentingnya sinergi antarlembaga dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

“Harmonisasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Anton.

Rapat dipimpin oleh Bahjahtul Mardiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, dan diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan serta CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan, hadir Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Abdurrahman Arrahimi, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Akhmad Sufian; perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Dalam sambutannya, Abdurrahman Arrahimi menekankan bahwa keberadaan Ranperbup ini sangat penting sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa.

“Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Melalui regulasi ini, kami ingin memastikan pembinaan dan pengawasan berjalan optimal agar koperasi desa dapat tumbuh sebagai pilar utama ekonomi lokal,” jelas Abdurrahman.

Sementara itu, Akhmad Sufian menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

“RPJMD 2025–2029 akan menjadi panduan strategis pembangunan Balangan lima tahun ke depan, menjabarkan visi dan misi Bupati ke dalam kebijakan dan program yang terukur serta akuntabel,” terang Akhmad.

Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, serta Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Herman Susanto, yang mewakili Kanwil Kementerian Hukum bidang Hak Asasi Manusia.

Pembahasan berlangsung secara konstruktif dan partisipatif. Diskusi berjalan lancar, mencerminkan komitmen semua pihak dalam menyempurnakan substansi peraturan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Ranperda RPJMD Tahun 2025–2029 bertujuan menjabarkan visi, misi, dan program Bupati Balangan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun penyusunan Ranperbup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didasarkan pada pentingnya penguatan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita keenam serta selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi.

Dengan dilaksanakannya harmonisasi ini, diharapkan kedua regulasi tersebut dapat segera ditetapkan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.

Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Bersama Pemkab HSU, Bahas Ranperda Dana Cadangan Pilkada 2029



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menyelenggarakan Rapat Harmonisasi sebagai bagian dari tugas dan fungsi pembinaan peraturan perundang-undangan di daerah. Kali ini, harmonisasi dilakukan secara virtual bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, Rabu (11/6/25).

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto. Kegiatan ini turut diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan dan CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara hadir antara lain Asisten Bidang Administrasi Umum Setda, Najeriansyah; Kepala Badan Pengelola Aset BPKAD, Muchtar Kusumaatmaja; serta Kepala Bagian Hukum Setda, Rusni.

Dalam sambutannya, Eryck menekankan bahwa rapat harmonisasi merupakan forum strategis dalam proses pembentukan peraturan daerah.

“Harmonisasi ini penting untuk memastikan agar substansi Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta menjamin kualitas dan kepastian hukum dari regulasi yang dibentuk,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, secara terpisah menyampaikan bahwa harmonisasi adalah tahapan krusial dalam proses legislasi di daerah.

“Harmonisasi menjadi instrumen penting untuk menyatukan berbagai kepentingan dan memastikan Ranperda selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ini juga bagian dari upaya Kemenkum untuk mewujudkan pelayanan hukum yang akuntabel dan berkualitas di daerah,” ungkap Nuryanti.

Najeriansyah dalam forum tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Kanwil Kemenkum Kalsel atas fasilitas yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pendampingan dan fasilitasi yang sangat prima. Ini sangat membantu kami dalam memastikan kualitas dan legalitas Ranperda yang sedang kami susun,” ujarnya.

Najeriansyah juga menjelaskan urgensi dari Ranperda ini dimana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2029 memerlukan pembiayaan yang sangat besar sehingga perlu perencanaan anggaran jangka panjang untuk memenuhinya.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dibebankan pada APBD. Maka, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pembentukan dana cadangan melalui peraturan daerah menjadi sangat diperlukan,” jelasnya.

Rapat harmonisasi ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum Kalsel dalam menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemenkum Kalsel Optimis Kayu Manis Loksado Jadi Indikasi Geografis Baru, Rapat Persiapan Diperkuat



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat lanjutan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terkait persiapan pemeriksaan substantif indikasi geografis (IG) kayu manis Loksado, Rabu (11/06/2025). Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan indikasi geografis kayu manis Loksado dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Tim Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis dari DJKI memberikan arahan dan masukan terkait langkah-langkah teknis yang perlu dipersiapkan, baik oleh Kanwil maupun oleh Pemerintah Daerah HSS, guna mendukung kelancaran proses penilaian.

Dinas Pertanian Kabupaten HSS turut hadir dalam rapat ini dan menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan administratif dan teknis. Pihak Pemkab HSS juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan seluruh pihak demi suksesnya proses pemeriksaan substantif ini.

Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Riswandi, bersama jajaran. Melalui Bidang Pelayanan KI, Kanwil terus mengintensifkan komunikasi dan kerja sama lintas sektor agar persiapan berjalan optimal dan optimis dapat membuahkan hasil yang diharapkan.

Rapat ini merupakan bagian dari tahapan lanjutan dalam rangka menyambut kedatangan tim pemeriksa substantif dari DJKI, yang akan turun langsung ke lapangan untuk menilai keunikan dan keaslian produk kayu manis asal Loksado sebagai indikasi geografis yang potensial.





Berbagi Ilmu, Bangun Sinergi! Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Sharing Knowledge SPIP dan Manajemen Risiko



Banjarmasin, Humas_Info – Rabu, (11/06) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Sharing Knowledge dengan tema "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko" yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing tim kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel, termasuk para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024, sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kegiatan dibuka secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, yang menyampaikan apresiasinya kepada para pegawai yang telah mengikuti pelatihan SPIP dan kini berperan sebagai mentor strategis dalam menyebarkan pengetahuan serta mendorong internalisasi nilai-nilai SPIP di lingkungan kerja.

"Manfaatkan momen ini untuk belajar dari rekan sejawat dengan aktif bertanya, berdiskusi, dan bersikap terbuka. Kegiatan ini bukan sekadar berbagi materi, namun juga menunaikan tanggung jawab moral, karena ilmu yang dibagikan akan terus berkembang, menjaga kesinambungan, dan memperkuat daya tahan organisasi," ujar Kakanwil dalam arahannya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaah Hukum, Anton Edward Wardhana yang hadir secara langsung memberikan sambutan pembuka. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya implementasi SPIP sebagai sistem yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan risiko, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

"SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari manajemen organisasi yang harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh insan pengayoman," ujar Anton Edward Wardhana.

Dalam Kegiatan utama yaitu Sesi sharing knowledge dipandu oleh pegawai dari Tim Kerja Perencanaan Anggaran dan Laporan yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan SPIP. Mereka menyampaikan materi pengenalan tentang SPIP dan Manajemen Risiko, serta membagikan pengalaman.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengendalian intern dan manajemen risiko dalam mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan.

Stafsus Menkum RI: Komunikasi dan Transparansi Jadi Kunci Penting untuk Sosialisasi Efektif



Bitung - Komunikasi dan transparansi menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh instansi pemerintah. Komunikasi yang efektif dan efisien, serta transparansi dalam menjalankan program akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum (Kemenkum). Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum (Stafsus Menkum), Dr. Yadi Hendriana, dalam Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.

“Persoalan komunikasi dan transparansi ini tidak sebatas hanya ketika kita berelasi dengan jurnalis saja, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana sosialisasi program kita kepada masyarakat itu efektif dan efisien serta mendapatkan feedback atau umpan balik dari masyarakat,” ujar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran itu kepada seluruh peserta kegiatan di Aula Badiklat Hukum Sulawesi Utara, Rabu (11/06/2025).

Lebih lanjut, mantan jurnalis nasional ini menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60.000 media massa di Indonesia, namun hanya sekitar 1.700 media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Dengan demikian, untuk dapat menjalankan sosialisasi program yang terpercaya kepada masyarakat, Kemenkum juga perlu memiliki sumber media tersendiri sebagai sarana sosialisasi. Yang teranyar, Kemenkum baru saja meluncurkan sarana komunikasi Podcast Kemenkum.

“Semua yang kita lakukan itu bisa diamplifikasi dan diapresiasi oleh publik jika kita mensosialisasikan secara efektif. Sebagai contoh, Podcast Kementerian Hukum,” kata Yadi.

Ia menyampaikan bahwa episode perdana Kemenkum yang membahas tentang naturalisasi atlet sepak bola telah berhasil mencapai 46.000 viewers dalam waktu empat hari ditayangkan. Menurutnya, program ini menjadi contoh komunikasi yang transparan untuk mengenalkan program pemerintah.

“Komunikasi yang efektif dan efisien serta transparan menjadi poin penting dalam menjalankan program pemerintah,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Stafsus Menkum juga menegaskan agar seluruh humas dan pegawai Kementerian Hukum dapat menjadi perpanjangan tangan Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja sama (Biro Hukerma) dalam memberitakan informasi terkait Kemenkum kepada publik dan meminta umpan balik dari masyarakat.

“Komunikasi itu sangat penting sekali. Tidak hanya cara komunikasinya saja, tetapi juga konten dan konteksnya seperti apa. Dan juga yang harus diperhatikan adalah bagaimana feedback-nya,” terang Yadi kepada para pranata humas di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Selaras dengan Staf Khusus Menkum, Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun, mengatakan bahwa komunikasi publik sangat penting untuk dilakukan melalui berbagai media seperti media konvensional, media online, dan media sosial. Ia juga meminta agar seluruh humas dapat tetap memperhatikan ketentuan branding Kemenkum dalam melaksanakan pemberitaan di media.

“Humas perlu senada dalam memberitakan tentang Kemenkum. Ikuti panduan branding yang sudah ditetapkan oleh Kemenkum dan gunakan akun-akun resmi Kemenkum untuk menginformasikan program-program dari Kementerian Hukum” ucap Ronald.



Ia juga meminta agar seluruh humas di Kanwil dan UPT dapat lebih aktif lagi dalam melakukan relasi dengan media-media massa di daerah.

“Kerja sama dengan media merupakan salah satu cara untuk bisa lebih menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Kerja sama-lah dengan media-media tier 1 dan 2 yang kredibel dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers,” pintanya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua juga menyampaikan bahwa peran Kanwil sebagai perpanjangan tangan unit pusat sangat penting dalam memastikan program dan kebijakan pusat terlaksana dengan baik di daerah.

“Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis berperan sangat penting di daerah, seperti mensosialisasikan berbagai program Kementerian Hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan komunikasi publik,” ujar Kurniaman.

Ia berharap agar Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi ini dapat menjadi sarana bagi seluruh Kanwil di daerah timur Indonesia untuk bekerja sama dalam melaksanakan komunikasi publik yang efektif, efisien, dan transparan.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja sama dilaksanakan perdana di Badiklat Hukum Sulawesi Utara pada tanggal 10-12 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta yang berasal dari Kanwil Kementerian Hukum Papua, Sulawesi, Maluku, serta UPT di wilayah yang sama.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti sangat mendukung arahan yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum, Dr. Yadi Hendriana, dalam kegiatan pembinaan dan koordinasi ini.

“Penekanan beliau terhadap pentingnya komunikasi dan transparansi menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum harus terus dibangun melalui informasi yang akurat, terbuka, dan mudah dipahami. Kami berkomitmen untuk memperkuat fungsi kehumasan di wilayah Kalimantan Selatan, tidak hanya sebagai corong informasi, tetapi juga sebagai jembatan dialog antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya

Indonesia Naik Peringkat FATF, Menkum Sebut akan Terus Tingkatkan Kinerja



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menerima apresiasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas kontribusi Kemenkum dalam meningkatkan peringkat kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi 7 Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU/PPT/PPSPM).

Peringkat Indonesia yang awalnya berada pada level Partially Compliant (PC) naik menjadi level Largely Compliant (LC).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan peningkatan peringkat FATF ini akan meningkatkan semangat jajaran Kemenkum, khususnya Direktorat Jenderal AHU, untuk meningkatkan kinerja, khususnya menjaga persepsi internasional terhadap sistem keuangan nasional Indonesia.

“Kami berterima kasih untuk sinergi bersama PPATK dan FATF. Serta apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen AHU yang telah bekerja keras, sehingga tentunya hal ini dapat menjadikan semangat bagi Kemenkum untuk lebih meningkatkan kinerja, khususnya dalam menjaga persepsi dunia terhadap sistem keuangan nasional,” kata Supratman di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam penyampaian tertulis kepada Menteri Hukum pada tanggal 28 Mei 2025, menyebutkan peningkatan peringkat yang diterima Indonesia menandakan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melaksanakan sanksi keuangan terhadap penyelewengan keuangan yang terjadi.

“Capaian ini menandakan Indonesia kini diakui telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang memadai untuk mencegah dan melaksanakan sanksi keuangan terhadap tindakan APU, PPT, dan PPSPM, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB,” sebut Ivan.

Ia menjelaskan bahwa peringkat dari FATF sangat mempengaruhi pandangan internasional terhadap kondisi hukum dan keuangan suatu negara. Sehingga, naiknya peringkat Indonesia nantinya akan turut meningkatkan persepsi positif Indonesia di mata internasional serta kepercayaan investor.

“FATF memegang peranan penting dalam menentukan persepsi internasional terhadap integritas sistem keuangan nasional. Peningkatan rating yang diterima Indonesia akan turut mendorong kepercayaan investor, menguatkan stabilitas sistem keuangan nasional, dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan peringkat Indonesia merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Kemenkum. Menurutnya, sinergi yang kuat telah menghasilkan pengakuan internasional terhadap Indonesia.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih secara tulus kepada Bapak (Menteri Hukum), termasuk jajaran Bapak (Menteri Hukum) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas peran aktif dan dukungan yang telah diberikan selama proses peningkatan rating ini berlangsung. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi yang kuat antar Kementerian/Lembaga mampu menghasilkan pengakuan yang konkret di tingkat Internasional,” sebut Ivan.

PPATK pun mengharapkan dukungan Kemenkum agar program APU/PPT/PPSPM dapat menjadi salah satu agenda prioritas dan strategis Kemenkum. Hal ini sejalan dengan implementasi Asta Cita k-7 Presiden Prabowo Subianto yaitu penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, yang salah satu fokusnya mencakup penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, turut mendukung capaian ini dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya penguatan sistem hukum nasional.

“Kami di jajaran wilayah menyambut baik peningkatan peringkat FATF ini sebagai bukti nyata dari kerja kolaboratif yang terarah dan berdampak strategis. Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan program APU/PPT/PPSPM di daerah serta mendukung kebijakan pusat sesuai tugas dan wewenang di wilayah,” ujar Nuryanti.

Kanwil Kalsel Ikuti Monitoring PKIPA dan TTE: Langkah Tegas Jaga Transparansi Anggaran



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Monitoring Data Kepemilikan Sertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pejabat Perbendaharaan serta Implementasi Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Kementerian Hukum secara virtual, Kamis (12/6).

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Kalsel, Yansurullah beserta jajaran, dalam rangka mendukung penguatan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah pemantauan masa berlaku TTE bagi seluruh pejabat perbendaharaan, mengingat keberadaan TTE menjadi kunci dalam pelaksanaan transaksi keuangan di modul SAKTI.

Dalam arahnya, Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Anna Ernita menegaskan bahwa seluruh pejabat perbendaharaan diwajibkan memiliki dan memperbarui TTE yang masih berlaku. Selain itu, mereka juga diwajibkan menandatangani dokumen Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) secara elektronik sebagai prasyarat untuk dapat melanjutkan transaksi keuangan melalui sistem aplikasi SAKTI. Pernyataan ini merupakan bentuk komitmen setiap pejabat perbendaharaan terhadap prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran negara.

Kegiatan monitoring ini menjadi langkah konkret dalam memastikan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel, senantiasa melaksanakan tata kelola anggaran yang berorientasi pada prinsip good governance.



Kemenkum Kalsel Gelar Monitoring dan Evaluasi Penempatan CPNS Tahun Anggaran 2024



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, Pada Kamis (12/06/2025). Kegiatan ini dipandu langsung oleh Selamat Riyadi selaku perwakilan tim kerja, dengan fokus utama pada pemantauan dan pembinaan terhadap proses penempatan CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses penempatan berjalan sesuai ketentuan, serta didukung oleh data yang valid. Selain itu, tim juga melakukan wawancara terhadap CPNS untuk menggali informasi mengenai penempatan pada masing-masing tim kerja serta memastikan kesesuaian antara kebutuhan unit dan kompetensi pegawai.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan pula berbagai informasi penting terkait hak-hak kepegawaian yang melekat pada CPNS. Salah satu hal yang disorot adalah implementasi regulasi Permenkumham Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang jabatan dan kelas jabatan, sebagai dasar dalam penentuan posisi dan tunjangan kinerja.

Terkait tunjangan, disebutkan bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2021, CPNS menerima tunjangan kinerja sebesar 80% selama masa percobaan. Sementara itu, berdasarkan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2022, CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional tetap diberikan tunjangan kinerja setara dengan kelas jabatan 6. Untuk CPNS yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu namun belum mendapatkan tunjangan fungsional, akan tetap menerima tunjangan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), khususnya dalam hal kelengkapan data identitas pegawai dan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmennya dalam membina CPNS secara menyeluruh sejak awal masa penempatan, sekaligus memastikan bahwa seluruh aspek administratif dan fungsional dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.

Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Tabalong



Tabalong, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Proses Legalisasi Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diselenggarakan pada Kamis, 12 Juni 2025, bertempat di Aula Tanjung Puri, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta menindaklanjuti undangan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Tabalong.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, mewakili Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, bersama jajaran Bidang Pelayanan AHU turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Tabalong, H. M. Noor Rifani, Asisten Perekonomian dan Administrasi, perwakilan dari OPD di lingkungan Pemkab Tabalong, seluruh Camat se-Kabupaten Tabalong, APDESI Tabalong, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalimantan Selatan, serta Notaris/PPAT (NPAK) yang bertugas di wilayah Tabalong.

Rapat koordinasi ini bertujuan mendorong percepatan legalisasi badan hukum koperasi di wilayah Tabalong sebagaimana ditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3.8/2899/SJ tanggal 3 Juni 2025. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk memastikan proses legalisasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa hambatan berarti di lapangan.

Dalam sambutannya, Bupati Tabalong menyampaikan pentingnya dukungan lintas sektor demi suksesnya legalisasi koperasi. "Saya minta seluruh Camat segera melengkapi dokumen dan intensifkan koordinasi dengan para Notaris serta Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Pembiayaan legalisasi bisa didukung melalui APBD agar proses tidak terhambat," tegas Bupati Tabalong.

Rapat kemudian dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Tabalong dan dilanjutkan paparan dari Kepala DKUPP Tabalong yang menyampaikan progres legalisasi koperasi. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi terbuka yang melibatkan Notaris, Camat, serta perwakilan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan guna mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi percepatan legalisasi koperasi.

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, menyatakan komitmen Kanwil dalam mendukung penuh upaya percepatan legalisasi ini. "Kami siap mendampingi, memfasilitasi, dan memberikan layanan terbaik agar koperasi-koperasi di desa dan kelurahan bisa segera memiliki status badan hukum yang sah. Ini bagian dari dukungan kami terhadap ekonomi kerakyatan," ungkap Dewi.

Adapun hasil rapat koordinasi meliputi:

- Bidang Pelayanan AHU akan memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan Pemkab Tabalong dan para Notaris terkait progres legalisasi koperasi.
- Progres legalisasi koperasi di Tabalong mencatat 14 koperasi telah resmi berbadan hukum, 25 koperasi lainnya sedang dalam proses pengesahan dari total 131 Desa/Kelurahan.
- Pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Pemkab Tabalong sebagai bentuk percepatan proses pembentukan dan legalisasi.
- Verifikasi berkas koperasi harus dilakukan secara cermat oleh masing-masing pihak untuk memastikan kelancaran proses legalisasi oleh Notaris.
- Komitmen Pemkab Tabalong, Camat, dan APDESI untuk segera menyelesaikan kelengkapan berkas koperasi yang masih belum lengkap.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan proses pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tabalong dapat berjalan optimal, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Jaga Warisan Daerah, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Nasional Indikasi Geografis



Banjarmasin, Humas_Info — Sebagai wujud komitmen dalam melindungi kekayaan intelektual komunal serta mendukung promosi potensi daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kamis (12/6).

Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh 234 peserta yang terdiri atas 83 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), 118 perwakilan dinas dari berbagai kabupaten/kota, serta 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.

Forum ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi teknis mengenai tahapan pemeriksaan substantif permohonan Indikasi Geografis (IG), terutama dalam pelaksanaannya secara daring. DJKI memaparkan alur lengkap mulai dari penyempurnaan dokumen deskripsi oleh pemohon, tinjauan lapangan oleh kantor wilayah, hingga proses verifikasi oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.

Beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam pemeriksaan antara lain legalitas organisasi pemohon, keunikan karakteristik produk, pengaruh faktor geografis, metode produksi, hingga sistem pengendalian mutu. Seluruh tahapan dilakukan secara kolaboratif dan transparan guna menjamin kualitas serta keaslian produk IG yang diajukan.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menegaskan peran aktifnya dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berbasis wilayah. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengangkat potensi unggulan Kalimantan Selatan agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global melalui mekanisme Indikasi Geografis.

Kanwil Kementerian Hukum Kalsel Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan KI Balangan



Banjarbaru, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Balangan menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petugas Pelayanan Kekayaan Intelektual, Jumat (13/6) di Hotel Aeris Banjarbaru.

Kegiatan ini diikuti oleh 16 petugas dari Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kabupaten Balangan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan layanan prima di bidang kekayaan intelektual, khususnya dalam pencatatan hak cipta.

Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, bersama Tim Kerja Fasilitasi Layanan KI dan Help Desk KI, turut hadir sebagai pelaksana kegiatan dan narasumber dalam bimbingan teknis tersebut. "Para peserta mendapatkan pelatihan mendalam mengenai prosedur pencatatan hak cipta yang efisien dan akurat, guna menunjang pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat, pelaku usaha, serta institusi di daerah," pungkasnya.

Pada kegiatan ini salah satu simulasi yang dilakukan adalah proses pencatatan hak cipta terhadap tiga inovasi dari Kabupaten Balangan yang berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Hal ini menjadi contoh nyata penerapan layanan prima dan digitalisasi proses dalam bidang kekayaan intelektual.

Melalui bimtek ini, diharapkan para petugas dapat lebih siap dalam memberikan pendampingan dan pelayanan yang optimal, serta turut mendorong perlindungan hukum terhadap karya cipta masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang sah secara hukum, karya-karya kreatif akan terhindar dari pelanggaran dan dapat berkontribusi dalam penguatan ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan.



Kemenkum Kalsel dan Pemkab Tapin Tingkatkan Sinergi Pembinaan Hukum dan Regulasi Daerah



Tapin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melakukan koordinasi dan penguatan tugas bersama Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin pada Kamis, 12 Juni 2025. Bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, beserta jajaran, sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan hukum serta penguatan regulasi di daerah.

Dalam pertemuan ini, Anton menyampaikan pentingnya mempererat sinergi antara Kemenkum dan pemerintah daerah untuk memperjelas arah kerja organisasi yang berbasis pada kebutuhan kelembagaan serta regulasi yang berlaku. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin, H. Zainal Abidin serta Kepala Bagian Hukum, Ahmad Ramadhan.

Sejumlah isu strategis menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut. Kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk terus memperkuat proses harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah yang diajukan. Selain itu, koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan dan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Kabupaten Tapin dengan memperkuat komunikasi serta kerja sama teknis yang lebih intensif.

Dalam aspek pembinaan paralegal di tingkat desa, Kemenkum mendorong Bagian Hukum untuk segera melengkapi dokumen administrasi Kepala Desa Buas-Buas yang saat ini menjadi peserta Paralegal Justice Award (Parletak) tahap II, termasuk Surat Keputusan Kelompok Kadarkum, SK Posbakum, dan surat rekomendasi. Terkait pelaksanaan Diklat Paralegal Serentak, Kemenkum juga mendorong peningkatan keikutsertaan Kepala Desa atau Lurah, mengingat sejauh ini baru satu peserta dari Kabupaten Tapin yang terdata.

Dibahas pula tentang optimalisasi pelaksanaan Perda Bantuan Hukum. Dalam hal ini, Bagian Hukum diharapkan segera mengusulkan peraturan bupati sebagai turunan dari Perda yang telah ada, agar layanan bantuan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Tapin dapat terlaksana secara efektif dan merata.

Salah satu poin penting lainnya adalah pembahasan mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih. Dalam sesi ini, turut hadir Kepala Bidang Koperasi dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk menyampaikan kendala yang dihadapi serta memberi masukan dan solusi. Koordinasi teknis akan segera dilakukan dengan desa/kelurahan dan Notaris Pembuat Akta Koperasi, guna mempercepat realisasi pendirian koperasi tersebut.

Menutup pertemuan, Kepala Divisi Anton Edward Wardhana mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengajukan permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang pendirian Koperasi Merah Putih. Hal ini menjadi langkah penting untuk memberikan landasan hukum yang sah bagi pembentukan koperasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hukum.

“Sinergi dan koordinasi yang terstruktur adalah kunci keberhasilan pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan di daerah. Kami berharap kerja sama ini terus diperkuat dan ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Anton dalam kesempatan tersebut.

Melalui koordinasi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Kemenkum dan Pemkab Tapin semakin solid, serta mampu mendorong peningkatan kualitas regulasi dan akses hukum di tengah masyarakat.



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkassel](#)



[@kemenkumkassel](#)



[kassel.kemenkum.go.id](#)